



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Mamuju, Rabu (08/07)** – Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (08/07) di Mamuju secara langsung.

Dalam sambutannya, Muhamad Toha menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Mamuju TA 2019, BPK memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah berhasil mempertahankan Opini WTP sebanyak tiga kali secara berturut-turut sejak TA 2017.

Atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2019 ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai rekomendasi guna meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2019 antara lain BPK mendorong agar (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam mengkondisikan kemampuan keuangan daerah terhadap proses penyusunan RAPBD dan RAPBD-P; (2) lebih cermat dalam menetapkan SPD sesuai dengan ketersediaan saldo Kas di RKUD persumber dana; (3) melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas keseluruhan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk tanah yang belum tercatat pada KIB A Tata; (4) menyetorkan kelebihan pembayaran intensif pemungutan pajak dan retribusi yang dibayarkan menggunakan APBD TA 2019; dan (5) menarik kekurangan denda keterlambatan atas Pembangunan Gedung Bappepan dan Keuangan serta Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Tamasapi kepada CV BSC dan CV MM.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tidak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**Informasi lebih lanjut:**

Kepala Sekretariat, Asih Waryanti  
Telp. (0426) 2322969 ext. 204/206

<https://www.mamuju.bpk.go.id>